

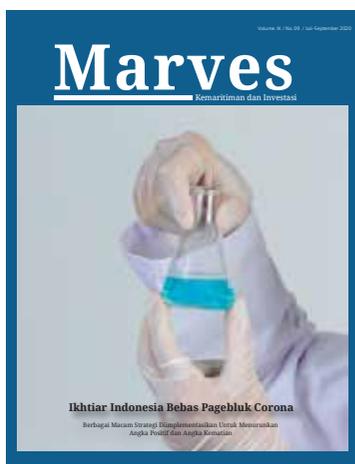
Marves

Kemaritiman dan Investasi



Ikhtiar Indonesia Bebas Pagebluk Corona

Berbagai Macam Strategi Diimplementasikan untuk Menurunkan
Angka Positif dan Angka Kematian



Majalah Marves
Volume IX
Juli - September 2020

Diterbitkan oleh: Sekretariat Kemenko Marves. **Penanggung Jawab:** Agung Kuswandono
Sekretaris Kemenko Marves. **Pemimpin Redaksi:** Andreas Dipi Patria Kepala Biro Komunikasi.
Redaktur Majalah: Khairul Hidayati Kepala Bagian Humas, Yanelis Prasenja Kasubbag POP,
Sugihyanto Kasubbag TU. **Jurnalis:** Fahdiansyah Kasmiri, Nostal Nuans Saputri, Sri Wida
Purbowasi, Muchlisa Choiriah, Kirana Atisaumya, Shafira Fadhiarizky, Ghizadhia Amira Putri, Murti
Ali Lingga, Cut Nabella Husaini, Anwar Sarifudin **Desain/Layout:** Dinta Audi Rahmalia, Bella
Rahmah Herlita, Vebianto Faladl, Rizal Arief Saifullah **Fotografer:** Wa Ode Sukma Sari, Meidika Sri
Wardiana, Ilma Nurweli, Ardenis Edbert Ramanta, Nafasya Ramadini Maura,

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.

Daftar Isi



Salam Marves

04 | Indonesia Bangkit Kembali

Liputan Utama

06 | Ikhtiar Indonesia Bebas Pagebluk Corona

Kilas Balik

09 | Kompilasi Foto Giat Kemenko Marves Periode Bulan Juli - September Tahun 2020

11 | Infografis Hari Maritim Tahun 2020

Liputan

12 | Miliki Banyak Potensi Maritim Kemenko Marves Terus Kawal Penguatan Potensi Kabupaten Sukabumi

15 | Ketika Pemerintah Dorong Percepatan Lumbung Ikan Nasional di Maluku

17 | Pembangunan Infrastruktur Sebagai Salah Satu Tumpuan Perekonomian Nasional

21 | Memajukan Lingkungan Demi Hidup Berkelanjutan Masyarakat Indonesia

25 | Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Momentum Kebangkitan Produk Lokal Bangsa

28 | Potensi Logam Tanah Jarang untuk Mempercepat Industri Nasional

Kolom

30 | Peran MHA Mutlak Diperlukan Dalam Perencanaan Pembangunan

32 | Pemerintah Dukung Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

34 | Seleksi CPNS Kemenko Marves

Feature

36 | Resensi Film Guru-Guru Gokil

37 | Cerita Pendek Lelaki Dalam Lukisan

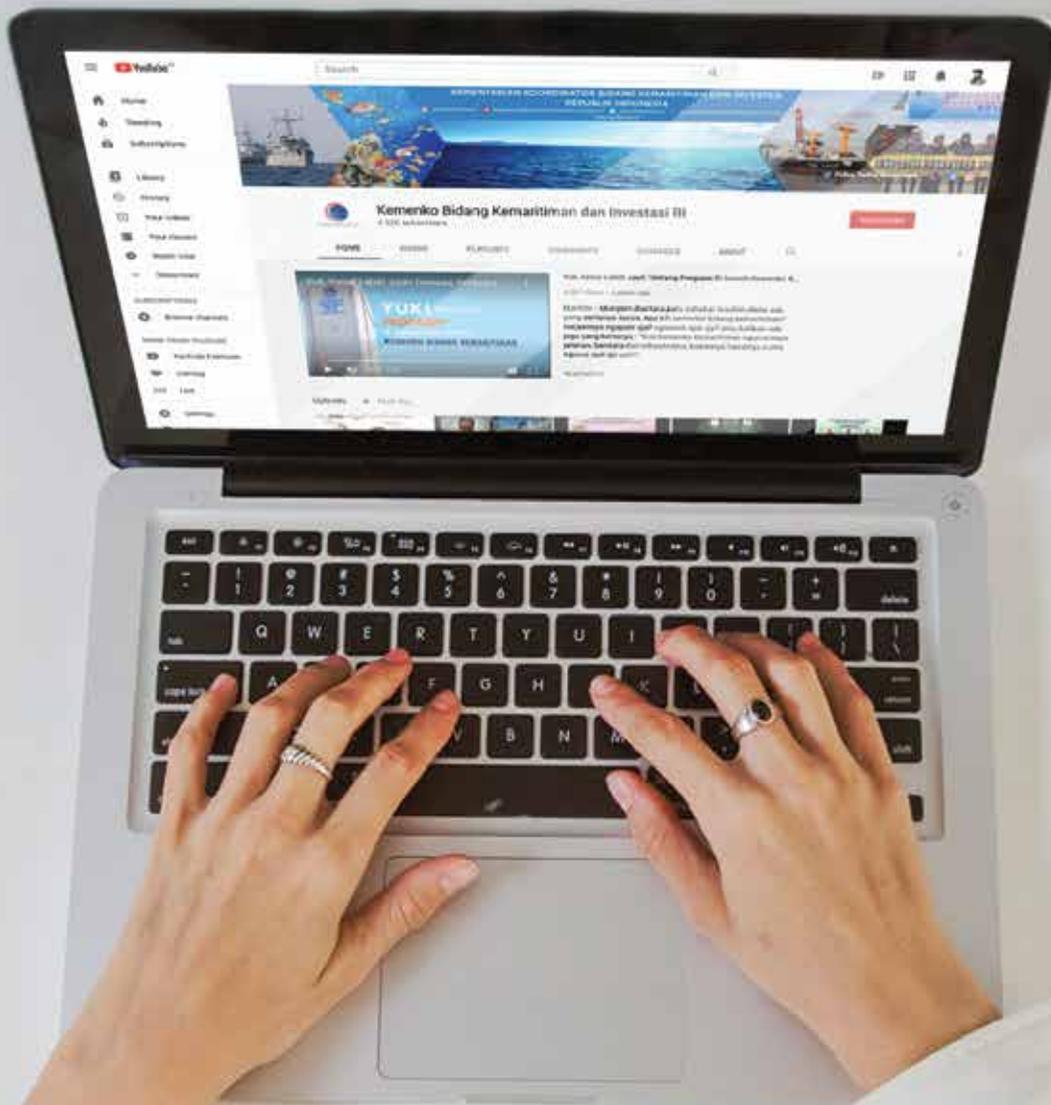
40 | Tahukah Kamu? Likupang Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Logam Tanah Jarang



Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

www.youtube.com/KemenkoBidangKemaritimandanInvestasiRI



Indonesia Bangkit Kembali

Halo #TimMarves Penanganan Covid-19 di Indonesia saat ini semakin gencar. Dengan amanah langsung yang diberikan oleh Presiden RI kepada Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, maka telah dilakukan berbagai upaya dalam pengendalian kasus Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya ini dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait agar seluruh upaya dapat berbuah maksimal.

Salah satu strategi yang sedang diupayakan adalah pemantapan dalam penyediaan vaksin bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan memantapkan logistik, target penerima, dan mekanisme vaksinasi yang ke depannya akan dilakukan.

Lebih lanjut, melalui keenam deputi Kemenko Marves, kondisi masyarakat juga selalu diperhatikan melalui berbagai programnya. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melakukan

penguatan potensi kemaritiman yang berada di daerah Sukabumi, selain itu Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim juga mendorong percepatan Lumbung Ikan Nasional yang berada di Maluku. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi juga memantau terus pembangunan delapan ruas tol baru yang berada di Indonesia. Ditambah pula dengan program *food estate* yang berada di Sumatera Utara, menjadi salah satu cara pemerintah untuk melakukan pengendalian ekonomi nasional yang diawasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Selain itu, untuk memajukan ekonomi dan pariwisata masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggerakkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan pembahasan logam tanah jarang juga menjadi fokus dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Agung Kuswandono
Sekretaris Kemenko Marves



Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
@kemenkomarves



Main tebak-tebakan yuk. Menurut #timmarves, apa nama jenis udang pada gambar di atas?

A. Udang Galah
B. Udang Vaname

✓ @syahdy.zhao
Jalan jalan beli kebab, kebab dimakan dinegeri kenya, kalau boleh saya menjawab, **B.Udang Vaname** jawabannya

✓ @rikoambarwanto
Jawaban nya adalah **B. Udang vaname**. Indonesia sendiri menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara pengekspor udang di pasar dunia setelah Thailand dan India.

✓ @bertho224
B.Udang vaname, udang vaname merupakan jenis udang konsumsi yang paling sering ditemukan di pasaran. Udang yang memiliki warna dominan putih ini sudah mampu dibudidayakan secara mandiri di Indonesia, sehingga pasokannya di dalam negeri cukup melimpah.

✓ @estynadya
UDANG VANAME! udang yg bikin aku alergi jd harus selalu inget :"





IKHTIAR INDONESIA

Bebas Pagebluk Corona

“*Saya minta setiap provinsi yang paling terdampak ini lebih menajamkan strategi menangani Covid-19. Harus ada pembagian tugas yang jelas, siapa yang berbuat apa dan kita turunkan semua sumber daya yang kita miliki. Setiap kita harus berkoordinasi dengan baik, terutama antara pemerintah daerah dan jajaran aparat setempat. Kita perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik supaya kita bisa menurunkan angka-angka kasus konfirmasi positif dan mortality rate.*

Luhut B. Pandjaitan
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Majalah Marves - Jakarta, Pada tanggal 14 September 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai wakil ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memperoleh perintah untuk mengawal perkembangan penanganan kasus Covid-19 di delapan provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Utara, ditambah Papua.

Perintah Presiden Joko Widodo kepada Menko Luhut untuk membantu dalam proses pengendalian Covid-19 dan PEN dilatarbelakangi oleh kinerja dan pengalaman Menko Luhut dalam melakukan strategi kerja sama antar institusi/lembaga semasa ia aktif di TNI Angkatan Darat dan di Pemerintahan.

“Mungkin Pak Presiden Joko Widodo memilih saya karena beliau melihat rekam jejak saya dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam menyelesaikan sebuah hal. Saya pun sudah terbiasa memimpin dan menurut saya, penanganan Covid-19 ini kuncinya integrasi antar-lembaga,” ungkap Menko Luhut dalam sebuah wawancara.

Melalui perintah tersebut Menko Luhut secara langsung melakukan gerakan dan gebrakannya. Gebrakan awalnya adalah melakukan secara terpadu koordinasi dan kolaborasi antar-institusi yang menangani Covid-19, yaitu Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah di delapan provinsi paling terdampak ditambah Papua, serta setiap jajaran aparat TNI dan Polri di tingkat pusat dan daerah.

“Saya minta setiap provinsi yang paling terdampak ini lebih menajamkan strategi menangani Covid-19. Harus ada pembagian tugas yang jelas, siapa yang berbuat apa dan kita turunkan semua sumber daya yang kita miliki. Setiap kita harus berkoordinasi dengan baik, terutama antara pemerintah daerah dan jajaran aparat setempat. Kita perlu melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik supaya kita bisa menurunkan angka-angka kasus konfirmasi positif dan *mortality rate*,” ujar Menko Luhut dengan tegas saat proses rapat koordinasi pertama setelah penunjukannya.

Berbagai macam strategi diimplementasikan untuk menurunkan konfirmasi angka positif dan menurunkan angka kematian,

“Dalam Pengendalian angka terkonfirmasi positif Covid-19 ini dilakukan tiga strategi utama, yaitu untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat, meningkatkan proses manajemen perawatan pasien Covid-19 guna menurunkan *mortality rate* dan meningkatkan *recovery rate*, serta penanganan secara spesifik kluster-kluster Covid-19 di setiap provinsi. Kita harus tindak tegas para pelanggar protokol kesehatan karena kalau tidak, mau sampai PSBB sepuluh kali pun, kondisi kita tidak akan membaik kalau masyarakat tidak disiplin,” jelasnya.

Untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan operasi yustisi yang diimplementasikan dengan adanya berbagai macam pemeriksaan kepada setiap pengendara motor dan mobil. Para pengendara diminta untuk selalu taat pada protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dengan benar. Kemudian proses manajemen perawatan pasien Covid-19 diimplementasikan dengan penambahan *bed* di setiap rumah sakit pada bagian ICU. Tidak hanya di rumah sakit, beberapa hotel di delapan daerah terdampak juga diminta untuk mengalihfungsikan hotelnya untuk pasien Covid-19, serta pembuatan protokol standar perawatan pasien Covid-19.

“Saya minta teman-teman semua untuk menambah jumlah *bed* di masing-masing fasilitas kesehatan supaya kita bisa menyembuhkan masyarakat dengan cepat dari Covid-19. Hotel juga sudah kita minta untuk sediakan fasilitas. Diharapkan mereka dapat ikut membantu menangani kekurangan fasilitas kita karena ICU yang saya lihat sudah mulai penuh atau tinggi *bed occupancy rate* tiap rumah sakit.” kata Menko Luhut pada salah satu rapat koordinasi bersama Menkes Terawan dan jajaran aparat di masing-masing daerah.

Selain meningkatkan kapasitas ICU dengan kerja sama bersama pihak hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi mandiri bagi pasien dan otg, pemerintah juga menyiapkan ketersediaan obat dan alat terapi dengan melibatkan RS-RS rujukan dibantu dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah-daerah. Protokol standar terapi penanganan pasien Covid-19 berisi tata laksana manajemen klinis ringan, sedang, dan berat yang disusun bersama lima organisasi profesi dokter spesialis yakni PDPI, PAPDI, IDAI, PERDATIN, PERKI, juga mengacu pada pedoman WHO terkait standar penanganan serta obat yang harus diberikan kepada pasien berdasarkan derajat kasusnya. Protokol standar perawatan pasien Covid-19 ini pun telah dituangkan ke dalam sebuah buku panduan yang dapat menjadi dasar tata laksana.

Kemenkes pun akan melakukan mentoring klinis ke berbagai ICU RS rujukan dan RS perawatan secara periodik untuk menurunkan angka kematian. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan protokol yang diberlakukan sesuai standar yang berhubungan dengan pasokan medis dan peralatan yang memadai dalam setiap fase CICO (*Circulation, Inflammation, Coagulopathy, Oxygenation*).

Strategi yang berfokus pada kesehatan ini juga didukung dengan upaya pemerintah memperlancar perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit. Menko Luhut sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mendorong agar BPJS kesehatan mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19.

“Saya minta BPJS segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan verifikasi data rumah sakit yang klaimnya terkendala agar tidak memengaruhi *cash flow* rumah sakit yang merawat pasien Covid-19,” ujar Menko Luhut ketika memimpin rapat

4 Jenis Vaksin

yang akan dibeli oleh Indonesia

Prefilled Syringe

Singel Dose Vial

Multi Dose Vial

Bulk



koordinasi percepatan penyelesaian klaim biaya perawatan pasien Covid-19.

Selain beberapa strategi yang sudah ada dan sedang dijalankan, vaksin juga menjadi penting dalam strategi pemerintah dalam menghadapi Covid 19. Dalam prosesnya, vaksin memang sedang disiapkan dan sudah ada beberapa perusahaan swasta dan dalam negeri yang membantu dalam pengerjaan riset dan proses produksi dalam negeri dan juga luar negeri.

“Saat ini vaksin menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, prioritas utama kita saat ini adalah pemantapan dalam logistik, target penerima, serta mekanisme vaksinasi yang akan kita laksanakan,” ujar Menko Luhut. Untuk sumber vaksin sendiri akan diupayakan diproduksi dalam negeri. Remdesivir akan dibuat oleh Bio Farma dengan menggunakan dua cara. Pertama, bekerja sama dengan India, kemudian uji klinis dilakukan bersama BUMN. Kedua, melakukan riset untuk produksi dalam negeri dan mengajukan izin impor.

Kegiatan penyediaan vaksin di Indonesia akan melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Kepala BO PM, serta Kepala BNPB. Saat ini, kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin. Untuk meningkatkan jumlahnya, pemerintah tengah membangun kerja sama antar-lembaga BUMN, khususnya Bio Farma dan Kimia Farma dalam pengadaan *Cold Chain Equipment Inventory* hingga memuat 300 juta vaksin.

Selain itu, pemerintah juga akan mengimpor beberapa vaksin dari luar negeri, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac. Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ke-3 dan dalam proses mendapatkan *Emergency Use Authorization* (EUA) di sejumlah negara. Cansino melakukan uji klinis tahap ke-3 di Tiongkok, Arab Saudi, Rusia, dan Pakistan. G42/Sinopharm melakukan uji klinis tahap ke-3 di Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), Peru, Moroko dan Argentina. Sementara itu, Sinovac melakukan uji klinis tahap ke-3 di Tiongkok, Indonesia, Brazil, Turki, Bangladesh, dan Chile. *Emergency Use Authorization* dari Pemerintah Tiongkok telah diperoleh ketiga perusahaan tersebut pada bulan Juli 2020. Pemerintah UEA ikut memberikan *emergency use authorization* kepada G42/Sinopharm. Baik Sinovac, Cansino, maupun

G42/Sinopharm, seluruhnya akan dijamin kehalalannya melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data.

“Indonesia akan membeli empat jenis vaksin, yakni *prefilled syringe*, *single dose vial*, *multi dose vial*, dan *bulk*”, ujar Menko Luhut. Setiap jenis vaksin ini berbeda-beda berdasarkan cara pakainya.

Pertama, *prefilled syringe* sudah dilengkapi dengan jarum suntik dan dapat digunakan vaksinasi. Kedua, *single dose vial* adalah vaksin yang digunakan hanya untuk satu injeksi. Baik *prefilled syringe* maupun *single dose vial* tidak akan ada pemborosan penggunaan.

Ketiga, *multi dose vial* merupakan vaksin yang dapat digunakan sebanyak lima hingga sepuluh kali injeksi. Karena penggunaan yang dapat lebih dari satu kali, ada kemungkinan *waste* sebesar 15-20 persen akibat pengambilan cairan yang tidak efisien.

Keempat dan terakhir, Indonesia akan mengimpor vaksin berbentuk *bulk*. Jenis ini masih berbentuk bahan vaksin yang siap untuk dimasukkan ke dalam vial. Vaksin *bulk* melalui sedikit proses *processing*, seperti produksi dan logistik, serta potensi pemborosan mencapai 20%. “Walaupun begitu, pembelian dalam bentuk *bulk* akan lebih mudah memperoleh komitmen dalam volume yang besar dari pihak *supplier* vaksin”, beber Menko Luhut. Ia melanjutkan, vaksin *bulk* juga dapat memanfaatkan kapasitas produksi di PT Bio Farma.

Ketiga vaksin ini akan mulai diimpor ke Indonesia pada bulan November 2020. Dari seluruh vaksin ini, Indonesia akan mengimpor 308.1 juta dosis yang akan disalurkan ke 135.7 juta masyarakat Indonesia. Di akhir tahun 2020 akan ada 9.1 juta orang yang menerima vaksin Covid-19. Vaksin ini akan diutamakan bagi para tenaga kesehatan, baik itu yang di rumah sakit, dinas kesehatan, maupun di puskesmas, serta penyedia jasa publik, terutama yang melakukan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan, seperti Satpol PP dan TNI/Polri.

“Strateginya untuk kepentingan *emergency* dan kepentingan nasional. Kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” pesan Menko Luhut.

Kilas Balik



02 Juli 2020
**Menko Luhut
Kunjungan ke
PT. BINTAN**



07 Juli 2020
**Menko Luhut
Kunjungan
Ke BPOM**



08 Juli 2020
**Menko Luhut
Memberikan
Ceramah
di Lemhanas**



17 Juli 2020
**Menko Luhut
Live Dialog
Metro Tv**



21 Juli 2020
**Menko Luhut
Kunjungan Ke
Pengolahan
Sampah Cilacap**



03 Agustus 2020
**Deputi Ridwan
Tinjau Lokasi
Marina Center
Padang**



25 September 2020
**Deputi Parekraf
Kunjungan
Ke Likupang**



10 September 2020
**Kemenko Marves
Menerima Bantuan
PCR Test Kit**



17 Oktober 2020
**Deputi Kedaulatan
Maritim dan Energi
Kunjungan
Ke Pembangkit
Listrik Tenaga
Hybrid Banyu
Biru di Bantul**





29 Juli 2020

**Menko Luhut
Kunjungan
Ke Banyuwangi**



11 Agustus 2020

**Peluncuran
Grabbike
Elektrik**



14 Agustus 2020

**Menko Luhut
Memimpin
Jam Pimpinan
Kemenko Marves**



17 Agustus 2020

**Menko Luhut
Upacara *Virtual*
Hari Kemerdekaan
Indonesia**



11 September 2020

**Deputi Bidang
Koordinasi Investasi
dan Pertambangan
Kunjungan Ke
Lapangan *Smelter***



04 September 2020

**Menko Luhut
melaksanakan
Penandatanganan
Deed of Agreement
antara Indonesia
dengan Australia**



28 September 2020

**Deputi Safri
Kunjungan
Ke ASC Cilegon**



10 September 2020

**Menko Luhut
Kunjungan Kerja
Ke Labuan Bajo**



20 September 2020

**Deputi Nani
Kunjungan Ke
Kawasan *Food
Estate* Humbanghas**



24 Juli 2020

**Menko Luhut
Menerima Laporan
Keuangan
Dari BPK**

Miliki Banyak Potensi Maritim,
Kemenko Marves Terus Kawal
**Penguatan Potensi
Kabupaten Sukabumi**





“

Nelayan di sini hampir luput dari perhatian kami. Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada mereka, karena selama ini telah melakukan praktek penangkapan hasil laut dengan tidak merusak lingkungan, kendati pembangunan infrastruktur di sini masih belum memadai.

Purbaya Yudhi Sadewa

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi



Majalah Marves - Wilayah Pesisir Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai potensi maritim, mulai dari sektor perikanan, pariwisata, energi, agrobisnis, dan berbagai potensi yang lainnya. Sayangnya, potensi tersebut belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa, melaksanakan kunjungan lapangan ke wilayah Ujung Genteng, Sukabumi.

Beberapa waktu lalu guna melakukan tinjauan langsung terkait dengan berbagai potensi yang ada di daerah tersebut, Ia lalu membuka diskusi bersama para nelayan setempat, melakukan kunjungan ke penangkaran penyu, dan budidaya lobster yang secara tradisional diolah oleh nelayan di sana. Pada kunjungannya ke Ujung Genteng yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, Deputi Purbaya berkata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah tersebut, khususnya para nelayan di Sukabumi. Hal ini disampaikannya saat menyaksikan pengibaran bendera di bawah laut yang dilakukan para nelayan setempat.



“Untuk itu saya sampaikan kepada bapak-bapak, kami akan mendata apa saja yang dibutuhkan dan mengatasi keluhan-keluhan yang sudah disampaikan,” ujar Deputi Purbaya saat berdialog dengan kelompok nelayan “Predator” di desa Pangumbahan sesaat sebelum melakukan upacara bendera tersebut, Senin 17 Agustus 2020.

Tidak hanya itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi juga melakukan rapat kordinasi lanjutan dengan pemerintah

daerah setempat di Bogor, pada Selasa 22 September 2020. Diikuti sekitar 10-15 perwakilan nelayan setempat demi mematuhi protokol Kesehatan, Deputi Purbaya mengingatkan agar para nelayan terus menerapkan pola hidup bersih dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker di manapun berada. Diskusi tersebut lalu dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi para nelayan, di mana mereka mengeluhkan beberapa tantangan seperti minimnya pasokan aliran listrik dan fasilitas dermaga tidak stabilnya aliran listrik ke wilayah Ujung



Genteng mengakibatkan rusaknya hasil tangkapan. Sedangkan fasilitas dermaga yang minim mengakibatkan kerusakan bagi sebagian besar kapal yang ada.

“Kami minta pemerintah untuk membantu membangunkan dermaga untuk tempat sandar kapal dan batu-batu pemecah ombak, karena selama ini ratusan kapal berdesakan di laut dan sebagian di pinggir pantai. Jika ombak datang perahu-perahu kami saling bertabrakan dan hancur,” kata salah satu perwakilan nelayan.

Pada bulan Mei lalu, puluhan kapal nelayan hancur dihantam ombak laut yang mengakibatkan ribuan nelayan berhenti melaut. Menurut para nelayan kondisi laut di sana memang unik karena lautnya dangkal ketika air pasang, sehingga banjir rob menjadi semakin besar. Nelayan mengatakan permintaan pembangunan dermaga ini telah diajukan sejak lima tahun lalu, tetapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Pembangunan dermaga ini dirasa makin mendesak karena menurut data Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, saat ini terdapat sekitar 4.000 nelayan di Ujung Genteng. Usai berdiskusi, rombongan meninjau pusat konservasi penyu Pangubahan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi. Fasilitas penangkaran ini memberikan banyak manfaat khususnya pelestarian alam dan penangkaran satwa yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar pula. Mengakhiri kunjungannya, Deputy Purbaya juga meninjau lokasi penangkapan lobster mandiri yang dikembangkan dengan teknologi sederhana oleh nelayan setempat di sekitar pantai Cicaladi.

“Tempat ini bisa menampung 150 nelayan dalam semalam dan satu orang bisa menangkap sekitar 150 bibit lobster yang siap dibudidayakan,” ujarnya di lokasi. Menindaklanjuti kunjungan tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terus melanjutkan dukungannya dengan kembali menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah setempat, khususnya Wilayah Pesisir Sukabumi, Kecamatan Ciracap dan Surade, yang masuk dalam rencana pengembangan Jawa Barat bagian selatan pada Selasa 22 September 2020. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Ishak Manafe. “Begitu banyak potensi yang

sudah terdeteksi di wilayah pesisir Ciracap dan Surade sehingga daerah ini memerlukan pengembangan terpadu dari Pemerintah,” ungkap Ishak.

Setelah sebelumnya dilakukan dua kali kunjungan ke kawasan Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi, menurutnya, dapat disimpulkan bahwa kawasan Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai potensi yang unggul dari berbagai sektor. “Kawasan ini punya berbagai potensi mulai dari Agrobisnis, Energi, dan Pariwisata. Tetapi, ditemukan pula beberapa kendala dan hambatan di sekitar wilayah tersebut,” ungkap Sesdep Ishak.

Akhirnya diketahui, hambatan utama pengembangan wilayah ini adalah tidak memadainya infrastruktur, suplai listrik yang kurang, ketidakjelasan hak kepemilikan dan pengelolaan lahan serta kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten seperti yang sudah ditinjau saat adanya kunjungan lapangan sebelumnya.

Untuk itu, Kemenko Marves mengambil langkah untuk terus mengawal dan menindaklanjuti potensi sekaligus kendala tersebut dengan membuka rapat koordinasi ini demi perkembangan potensi wilayah terkait. Dalam rakor ini, hadir para perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, yaitu Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat, Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukabumi, Camat Ciracap dan Camat Surade yang masing-masing didampingi empat Kades-nya, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Sukabumi, serta Koordinator Balawisata Pantai Selatan. “Untuk lebih mematangkan rencana ini, maka selanjutnya kami akan mendiskusikan hal ini secara lebih rinci dengan K/L teknis terkait. Dan saya harap, rakor ini dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah dan Provinsi untuk berdiskusi terkait banyaknya potensi yang dapat terus dikembangkan. Kemenko Marves akan terus mengawal perkembangan pembangunan dari berbagai potensi ini,” tutup Sesdep Ishak.

Wilayah pesisir Sukabumi ini akan terus menjadi wilayah pengembangan karena potensi yang dimilikinya. Diharapkan, wilayah tersebut dapat memberikan banyak manfaat kemaritiman bagi masyarakat sekitar.

Ketika Pemerintah Dorong Percepatan Lumbung Ikan Nasional Di Maluku

Maluku dinilai mampu meraih gelar sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) karena memiliki banyak potensi ikan laut.

“**Kendala-kendala ini sedang kita kerjakan dan saya berharap secepatnya semua bisa terpetakan dan terselesaikan satu persatu demi mendorong pengembangan perikanan tangkap di Indonesia. Mari kita bersatu untuk menyelesaikan permasalahan perikanan di Indonesia.**

Safri Burhanuddin

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Majalah Marves - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan yakin bahwa Maluku mampu meraih gelar sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), sebab menurutnya ada banyak potensi ikan laut di laut Ambon, Maluku. Untuk itu, dalam rangka mendorong percepatan implementasi program LIN tersebut, Menko Luhut menugaskan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin terus melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait perkembangan LIN Maluku ini.

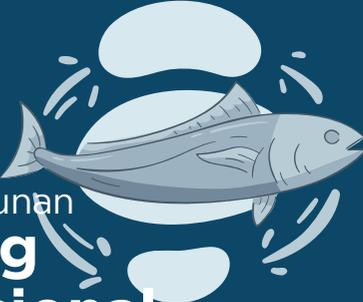
Menjadi tanggung jawabnya, Deputi Safri mengungkapkan hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Maluku terintegrasi, sebab pelabuhan merupakan suatu kawasan di mana perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan perikanan industri masuk semua di sana. Dalam mengintegrasikan pelabuhan tersebut, tak dipungkiri bahwa terdapat beberapa kendala yakni mengenai permasalahan aksesibilitas, khususnya bagaimana terkait dengan *transport rate cost*, serta kendala kualitas ikan yang dianggap semakin berkurang akibat jarak tempuh yang menghabiskan waktu lebih lama.

Oleh karena itu, menurut Deputi Safri, penting sekali adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan dan diimplementasikan secara disiplin di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Selain itu, penting juga mempraktikkan cara penangkapan ikan dengan baik. "Para nelayan sebagian sudah memiliki sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), sehingga tugas kita untuk melakukan monitoring terkait implementasinya di lapangan" ungkap Deputi Safri, pada Selasa silam (11-08-2020).

Sebab, tambah Deputi Safri, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan tersebut adalah adanya proses sertifikasi. LIN hanya akan berperan maksimum jikalau kualitasnya ditingkatkan. "What's the next, setelah lumbung ikan? Karena ini yang paling penting, ada tidak kebijakan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap ini," tambahnya lagi.

Menurut Deputi Safri, Maluku merupakan suatu daerah yang secara alami memiliki potensi perikanan dan pariwisata, sehingga jelas harus ada tata ruang dan *masterplan*-nya. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah baik dari pusat maupun daerah sangat berkomitmen dalam pengembangan LIN di Maluku yang diketahui 92,4% geografisnya merupakan laut.

3 Lokasi Alternatif Pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Maluku



Perbatasan Desa Tulehu dan Desa Waai

Antara Desa Waai dan Desa Liang

Desa Liang

Tak main-main dengan perkembangan LIN di Maluku, pada Kamis (17-9-2020), Deputi Safri mengungkapkan setidaknya ada 3 (tiga) lokasi alternatif pembangunan Lumbung Ikan Nasional di Maluku, yakni lokasi ke-1 di perbatasan Desa Tulehu dan Desa Waai (berjarak 30 km dari kota Ambon dengan luas 400 Ha dan sudah ada *feasibility study*-nya dari Port

Rotterdam Belanda). Untuk lokasi ke-2 berada antara Desa Waai dan Desa Liang (dengan luas 574 Ha, terdapat pembangunan pembangkit listrik uap namun sedang mangkrak serta belum ada *feasibility study* nya dan sedang diajukan KKP sebesar 1,5 T untuk menyelesaikan *feasibility study*). Sementara untuk lokasi ke-3 lebih mengarah ke Desa Liang dari lokasi ke-2 (tidak memerlukan reklamasi yang terlalu luas, tetapi belum ada *feasibility study* nya).

Turut andil dalam LIN di Maluku, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji menambahkan bahwasannya perlu menjangkau semua permasalahan terkait perikanan tangkap dari kementerian teknis di bawah koordinasi Kemenko Marves, khususnya dengan mengacu pada pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan implementasi Lumbung Ikan Nasional. Di samping itu, juga perlu membahas terkait permasalahan perizinan kapal perikanan dan alat penangkap ikan termasuk juga permasalahan regulasinya.

Selain itu, perlu koordinasi dan membentuk tim untuk mempercepat permasalahan-permasalahan perikanan tangkap, baik dari regulasi perizinan kapal perikanan, kajian ulang terkait data stok, produksi, dan kapal perikanan, serta perlu adanya reviu RPP di tiap WPP *Piloting*.

Oleh sebab itu, Asdep Ikram Sangadji berharap ada koordinasi yang berjalan dengan baik antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, paguyuban, dan pihak terkait lainnya.

Diketahui bahwa produksi perikanan tangkap dominan dari budidaya, namun begitu, kontribusi perikanan tangkap masih belum optimal terhadap PDB nasional dan dirasa masih sangat rendah. Untuk itu pendekatan pengelolaan perikanan berbasis WPP merupakan rujukan dalam pengelolaan perikanan yang tidak saja terkait perikanan tangkap, tetapi meliputi subsektor lainnya seperti perikanan budidaya, peningkatan daya saing, pengelolaan ruang laut, industri, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk Maluku sendiri diketahui merupakan provinsi kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan tangkap yang besar dengan jenis ikan yang beragam mulai dari ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang, pelagis kecil, demersal, udang, cumi-cumi dan ikan karang. Hal tersebut mendorong pemerintah menjadikan wilayah Maluku menjadi LIN.



Pembangunan Infrastruktur Sebagai Salah Satu Tumpuan **Perekonomian Nasional**



Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi mendukung penuh, dengan terus mengawal dan melakukan percepatan berbagai proyek infrastruktur

Majalah Marves - Menko Marves Luhut B. Pandjaitan di dalam suatu agenda resmi menyatakan, bahwa telah banyak yang dilakukan pemerintah di bidang infrastruktur terutama pembangunan jalan tol. "Pada tahun 1978-2014, jalan tol yang dibangun adalah sekitar 795 km, pada enam tahun terakhir telah terbangun 1,371 km. Ini karena Presiden yang rajin membangun infrastruktur dan jenderal lapangnya adalah Pak Basuki (Menteri PU-PR), saya apresiasi beliau. Sampai 2024 nanti 4.700 km tol akan selesai dibangun. Menurut saya ini pencapaian yang luar biasa," ujar Menko Luhut dalam acara penandatanganan perjanjian perusahaan jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo, Rabu 9 September 2020.

Menambahkan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, lalu mendukung penuh pernyataan Menko Luhut, dengan terus mengawal dan melakukan percepatan berbagai proyek infrastruktur, diantaranya pembangunan Jalan Tol. Bukan hanya sekedar *lip service*, namun dibuktikan dengan terjun langsung ke lapangan guna meninjau, mengevaluasi, dan membantu mencari solusi bila terjadi hambatan.

Sebagai Kementerian Koordinator yang berfungsi sebagai koordinator, fasilitator, dan sinkronisator kementerian/lembaga lain di bawah koordinasinya, Kemenko Marves terus mengawal percepatan pembangunan Jalan Tol, salah satunya dengan melaksanakan, Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Jatinangor pada 23 Juli 2020.

Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) rencananya akan selesai dan dioperasikan pada Desember 2021. Jalan Tol yang terdiri dari enam seksi tersebut akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang sudah mulai beroperasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), untuk progres pembebasan lahan pada Seksi 1 Cileunyi-Rancakalong (10,57 Km) sudah mencapai 92,5% dan progres konstruksi 58,56%. Seksi 2 (17,05 Km) Fase I dari Rancakalong-Ciherang sudah selesai tahun 2017 dan Fase II Ciherang-Sumedang pembebasan lahannya mencapai 95,5% dan untuk konstruksi sudah 85,46%. Sementara Seksi 3 hingga Seksi 6 yang menghubungkan Sumedang-Cimalaka-Legok-Ujung Jaya-Dawuan sepanjang 32,65 Km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi Rp 8,41 Triliun.

Sementara, untuk Seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka 4,05 Km yang dikerjakan BUJT saat ini konstruksinya telah rampung 100%. Selanjutnya tinggal pembangunan seksi 4-6 yang saat ini telah dimulai juga pekerjaan *site clearing* dan dijadwalkan selesai 14 bulan ke depan pada November 2021. Dengan beroperasinya seluruh ruas Jalan Tol Cisumdawu dan nantinya terhubung dengan



Pembangunan Ruas Tol Baru

Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo	96,57 km	Tol Harbour Road Tanjung Priok - [Pluit	8,9 km
Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan	60,1 km	Tol Jogja - Bawean	75,83 km
Tol Kertajati - Cipali	3,6 km	Tol Gilimanuk - Mengwi	95,22 km
Tol North-South Link Bandung	14,2 km	Tol Kediri - Kertosono	20,3 km

Jalan Tol Akses BIJB Kertajati akan mengurangi waktu tempuh dari Bandung sekitar 3 jam menjadi 1 jam. Dengan konektivitas yang semakin meningkat, maka operasional bandara akan semakin meningkat dan kompetitif, sehingga diharapkan bisa menggantikan Bandara Husein Sastranegara di Bandung.

Sebelumnya di awal bulan September Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ayodhia G.L. Kalake kembali turun langsung ke lapangan guna meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.

Dalam laporan hasil tinjauan langsung yang dilaksanakan belum lama ini, Plt Deputi Ayodhia memaparkan *progress* dan berbagai hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan, terkait pembangunan jalan tol tersebut, hal ini nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depannya.

“Pembangunan tol ini sebuah keniscayaan, sebab ini dapat meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, mengembangkan wilayah yang dilalui jalan tol, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memunculkan pusat pertumbuhan baru,” ujar Plt Ayodhia.

Perintah Presiden Joko Widodo Jelas, Bangun Infrastruktur Di Luar Pulau Jawa

Lebih lanjut, sebelumnya pada tanggal 3 Agustus 2020, Kemenko Marves, diwakili saat itu oleh mantan Deputi Ridwan Djamiludin, meninjau langsung perkembangan berbagai proyek infrastruktur di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, antara lain, Pelabuhan di Labuhan Bajau dan Proyek Jalan Trans Mentawai. “Arahan Presiden Joko Widodo, yang kemudian ditegaskan oleh Menko Marves Bapak Luhut, bahwa perintahnya sudah jelas, yaitu membangun berbagai proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, utamanya di luar Pulau Jawa. Dan, Mentawai ini salah satu daerah yang diprioritaskan. Banyak kemajuan, investor juga sudah siap dan kita akan jadikan wilayah ini sebagai tempat wisata eksotis kelas dunia,” jelasnya.

Pemerintah mempunyai konsep besar agar Mentawai dapat segera terbuka keterisolasiannya dan juga sekaligus mengangkat status Mentawai dari yang awalnya daerah tertinggal. Satu hal yang paling penting, Mentawai adalah bagian dari Republik Indonesia yang tidak boleh ditinggalkan, tujuannya berbagai infrastruktur tersebut akan berguna untuk masyarakat. Selain di Mentawai, Pemerintah pun tengah merancang pembangunan *Marina Center* di Padang. Dalam pembangunan *Marina Center* yang akan dikelola oleh Pelindo II ini, mantan Deputi Ridwan meminta agar nantinya ada nuansa laut/ nuansa maritim di kota Padang. Oleh karena, hal itu sebelumnya sudah dikordinasikan dengan pemerintah setempat dan semua sudah sepakat untuk pembangunannya.

“Sehingga harapannya nanti kita terbangun *Maritime Center* bisa menjalankan fungsi sebagai pelabuhan dan juga menjadi tempat contoh yang baik bagaimana sebuah komunitas berbasis maritim bisa dihidupkan,” imbuhnya.

Gencar Bangun Infrastruktur Digital Di Wilayah 3T

Masih dalam rangkaian agenda kunjungan kerja Kemenko Marves ke Sumatera Barat, Wagub Sumbar Nasrul Abit mengungkapkan persoalan telekomunikasi atau jaringan internet, khususnya di Mentawai dan daerah lain di Sumatera Barat yang masih *blank spot* atau belum tercover areanya. “Terkait masalah telekomunikasi, akibat pandemi ini sistem belajar berjalan dengan daring, dan ini adalah persoalan baru di Sumatera Barat yang harus diatasi dengan segera, untuk itu kita sudah bersurat kepada Kemenkominfo dan ditandatangani oleh Bapak Gubernur, dan sudah diusulkan sebanyak 404 *tower* di Sumatera Barat ini, melalui BAKTI Kominfo kita dapat informasi bahwa 38 akan dipasang pada tahun ini,” ujarnya.

Cepat direspon oleh Kemenko Marves yang telah menindaklanjuti langsung kepada pihak BAKTI Kemenkominfo, direncanakan pada tanggal 25 Agustus 2020 sudah sampai ke Mentawai. Jaringan telekomunikasi dan internet yang diutamakan atau diprioritaskan adalah *spot-spot* di lokasi-lokasi terdekat dengan sekolah.

Tidak dapat dipungkiri, Infrastruktur Digital telah menjadi acuan baru saat ini. Tidak terkecuali di daerah atau wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, Terluar). Misalnya Kepulauan Anambas yang jauh sebelumnya telah tercover oleh layanan digital. Data Kemenko Marves; sudah terbangun 102 titik akses internet, sudah terbangun 49 BTS dan 90% wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah tercover dengan *fiber optic*.

Infrastruktur digital dinilai sangat penting, antara lain guna menjaga wilayah teritori kedaulatan Indonesia, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, dikarenakan merupakan daerah terdepan yang rawan potensi konflik perbatasan.

Sebagai bukti keseriusan lainnya, sebelumnya Kemenko Marves juga memberikan dukungan bagi pengembangan sektor pariwisata di Bintan *Resort*, Kepulauan Riau agar bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. Nantinya Bintan *Resort* wajib menerapkan protokol sangat ketat sesuai dengan Surat Edaran yang telah dikeluarkan oleh Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19, dan siap menerima wisatawan dengan konsep adaptasi kebiasaan baru.

Kemudian, melakukan percepatan pembangunan terminal *multipurpose* di Desa Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai

Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 24 Juli 2020. Pembangunan terminal *multipurposes* di Desa Wae Kelambu ditargetkan akan selesai dalam 150 hari kerja yaitu pada bulan Desember 2020.

Selanjutnya, mengawal dan mendukung realisasi Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT Batang), Jawa Tengah. Dengan membantu mengoordinasikan apabila ada permasalahan yang sifatnya harus segera diatasi oleh berbagai pemangku kepentingan. “Adapun, sejak Juni 2020, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Kawasan Industri Terpadu Batang (KIT). KIT Batang berada di lokasi yang sangat strategis, karena dekat dengan jalur tol trans-Jawa dan juga rel kereta api serta berada di tepi pantai. Rencananya ada 4 konsorsium yang berperan dalam proyek strategis tersebut, antara lain; PT Pembangunan Perumahan (Persero) sebagai konsorsium utama, KIWI, PTPN9 dan Perusda Batang,” jelas Plt Deputi Ayodhia di lokasi peninjauan langsung, Sabtu (5 September 2020).

Terkini, Kemenko Marves juga meresmikan Rute Pengiriman Logistik Peti Kemas Selayar-Surabaya, pada Rabu 9 September 2020, bertempat di Pelabuhan Rauf Rahman, Selayar, Sulawesi Selatan. Inipun sesuai Sesuai dengan amanat Pemerintah untuk membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Selayar dan yang paling penting ialah perlahan mengembalikan kejayaan Selayar di bidang perniagaan maritim.

“**Pembangunan tol ini sebuah keniscayaan, sebab ini dapat meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, mengembangkan wilayah yang dilalui jalan tol, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memunculkan pusat pertumbuhan baru.**

Ayodhia Kalake

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi



Pengembangan *food estate* berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Lokasi tanah di Humbahas diperhitungkan sebagai salah satu tempat yang cocok untuk pengembangan hortikultura dan tanaman herbal di Indonesia.

**KEGIATAN PENGEMBANGAN FOOD ESTATE
BERBASIS HORTIKULTURA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020**

NAMA KOMODITI : KENTANG

VARIETAS : CHITRA

BULAN TANAM : NOVEMBER 2020

LUAS LAHAN : 50 Ha



Memajukan Lingkungan Demi Hidup Berkelanjutan Masyarakat Indonesia

Majalah Marves - Pengelolaan lingkungan dan kehutanan menjadi hal yang penting bagi negara, baik bagi pemerintah dan masyarakatnya. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, melakukan berbagai program kerja untuk dapat mengelola lingkungan dengan baik. Pengelolaan ini ditujukan untuk menjaga keadaan alam di Indonesia tetap baik dan juga memperhatikan kelangsungan hidup masyarakatnya.

Saat ini, program yang sedang digarap oleh Deputi PLK adalah *Food Estate* di Sumatera Utara serta teknologi pengelolaan sampah *Refuse Derived Fuel* (RDF) di Jawa Tengah. Kedua program ini ditujukan salah satunya untuk dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat pada daerah yang berkaitan.

Food Estate Sumatera Utara

Untuk mendukung program Presiden RI Joko Widodo mengenai ketahanan pangan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves bekerjasama dengan KLHK, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, BPPT, beserta jajaran provinsi Sumatera Utara.

Saat ini, pengembangan *food estate* berada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Lokasi tanah di Humbahas diperhitungkan sebagai salah satu tempat yang cocok untuk pengembangan hortikultura dan tanaman herbal di Indonesia. "Peninjauan yang kami lakukan adalah untuk pengembangan pusat konservasi, penelitian, dan inovasi Sumut. *Pollung* dianggap cocok karena selain ketinggian (1.400 mdpl) dengan tanah vulkanik yang subur juga karena berisikan tanaman endemik dan potensi sebagai pusat unggulan herbal serta wisata ekologi," kata Deputi Nani dalam kunjungannya Sumatera Utara, Jumat (17-07-2020).





Peninjauan lapangan lanjutan dilakukan oleh Tim Terpadu kunjungan pada bulan September untuk mengevaluasi lahan serta mengidentifikasi permasalahan di lapangan untuk dapat mempercepat pengembangan program food estate di Sumatera Utara. Dari 1000 Ha lahan yang ada akan diintegrasikan dengan Taman *Sains* Teknologi Herbal dan Hortikultura (TST-H2).

Wilayah lahan di Humbahas difokuskan sebagai pengembangan Pusat Keunggulan Pertanian seluas 1000 Ha yang akan menjadi tempat untuk etalase teknologi dan pusat pelatihan pertanian modern di Indonesia dengan mengedepankan pembangunan berbasis ekosistem. Pada lahan ini, komoditi yang akan ditanam adalah kentang, bawang merah, dan bawang putih.

Melalui program *food estate* ini diharapkan dapat memanfaatkan lahan yang selama ini kurang optimal, serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Utara. Dari total luasan lahan, maka 215 Ha akan dikelola oleh Kementerian Pertanian dan 785 Ha akan dikerjasamakan dengan investor swasta. Nantinya akan dilakukan kerjasama antara petani dan investor dalam pengelolaan lahan di Humbahas. Kerja sama ini akan mendapatkan pendampingan dari Kementerian Pertanian dan Pemkab Humbang Hasundutan.

250 petani juga telah mendapatkan sosialisasi dan pendampingan mengenai pengelolaan lahan yang akan digunakan dalam *food estate* ini. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan akademisi dari ITB, IPB, UGM, IT-DEL, Universitas Sumatera Utara, Universitas Tapanuli, serta Politeknik Pengembangan Pertanian.

"Petani di sini merasa antusias dengan rencana pengembangan *food estate* di wilayah Humbang Hasundutan. Kami sudah terbiasa menanam tiga komoditi tersebut, dan kami terbuka dengan penerapan teknologi yang akan digunakan," jelas warga setempat kepada Deputi Nani dalam tinjauan lapangan. Hal utama bagi Deputi Nani adalah pengawalan serta bimbingan bagi petani dalam melakukan pengelolaan lahan *food estate* ini.

Melanjutkan kegiatan tinjauan lapangan, Deputi Nani Hendiarti mengundang para calon investor untuk berdiskusi mengenai rancangan skema kerja sama antara petani serta calon investor. Para calon investor ini di antaranya adalah PT Indofood, PT Champ, dan PT Calbe Wings. Deputi Nani meminta agar perusahaan dapat berjalan beriringan dengan petani dan pemerintah tanpa ada yang dirugikan.

Dengan perkembangan serta koordinasi dalam *food estate* di Humbang Hasundutan, Kemenko Marves bersama K/L terkait menyiapkan pengembangan *food estate* Sumatera Utara seluas 61.000 Ha yang meliputi wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Pakpak

Barat. Lahan yang telah diproyeksikan ini akan dilakukan proses kajian lingkungan dan proses peralihan fungsi kawasan hutan.

“Kita bersama harus menyiapkan rencana induk pengembangan dan pengelolaan program *food estate* Sumatera Utara. Harus ada komunikasi antarkementerian dan lembaga terkait untuk mendiskusikan mengenai rencana dan tahapan yang perlu dilakukan untuk memetakan langkah-langkah apa saja yang bisa kita kerjakan ke depan,” ujar Deputy Nani. Ditambahkan pula bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan investor terkait untuk dapat bekerja sama secara paralel agar program *food estate* dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

Pengelolaan Sampah Menjadi Bahan Bakar Alternatif

Sampah sudah menjadi masalah besar di Indonesia yang telah berlangsung selama belasan tahun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, bahwa masalah penanganan sampah di Indonesia saat ini telah memperlihatkan harapan.

“Masalah sampah ini adalah masalah luar biasa, penanganannya juga harus cepat, Pak Presiden juga terus mengingatkan kami para pembantunya. Karena sudah 12 tahun lalu sejak beliau menjadi Walikota, penanganan sampah belum juga tuntas, program lain *waste to energy* juga belum tuntas, dan RDF ini adalah bentuk nyata dari penyelesaian masalah ini,” kata Menko Luhut usai meresmikan fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) pertama di Indonesia yang berlokasi di TPA Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah pada Juli 2020.

RDF adalah teknologi pengolahan sampah melalui proses *homogenizers* menjadi ukuran/butiran kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan dalam proses pembakaran pengganti batubara. Fasilitas RDF ini mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif, yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. RDF di Cilacap telah menjadi titik balik momentum pengelolaan sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengolahnya menjadi bahan bakar yang dipakai untuk pembakaran di pabrik semen. Hasil dari pengelolaan ini dapat berubah menjadi semacam pengganti batubara atau bisa juga disebut dengan *co-firing*.

Melihat keberhasilan penerapan teknologi RDF di Cilacap, Kemenko Marves melalui Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves mengajak 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengikuti jejak Cilacap dalam pengelolaan sampah perkotaan. Maka pada September 2020, dilakukan tinjauan lapangan untuk melakukan studi banding pada teknologi RDF di Cilacap.

“8 wilayah yang kita ajak adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, Cianjur, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi, dan Kota Sukabumi. Melihat keberhasilan teknologi RDF di Cilacap, kami mengajak wilayah lainnya di Jawa Barat untuk dapat mempelajari dan menerapkan teknologi ini. Nantinya kita dapat mendukung percepatan pembangunan teknologi RDF di 8 wilayah Jawa Barat,” ujar Asisten Deputy Pengelolaan Sampah dan Limbah, Rofi Alhanif mewakili Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Melalui studi banding ini, Kemenko Marves bersama 8 kabupaten/kota lainnya melihat dari dekat bagaimana teknologi RDF bekerja. Ditinjau dari proses pengangkutan serta penimbangan sampah, dilanjutkan dengan pengolahan, proses produksi, dan implementasi dari RDF ini.

Bupati Cilacap Totto Suwarti Pamuji mengucapkan terima kasih dan menambahkan, “Di Cilacap, sampah dikelola dengan baik dan menjadi manfaat bagi masyarakatnya. Dengan penerapan teknologi RDF, membuat masyarakat antusias dalam melakukan pemilahan serta pengolahan sampah., sehingga saat ini sampah telah berkurang dan hampir tidak ada tumpukan sampah di Cilacap. Diharapkan dengan akan diterapkan teknologi RDF pada wilayah tetangga dapat menyelesaikan masalah sampah yang terjadi pada setiap wilayah. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenko Marves.”

Melalui tinjauan lapangan ini, Kemenko Marves akan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dari 8 wilayah di Jawa Barat dan pemerintah daerah lainnya di serta seluruh Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat mewujudkan penerapan teknologi RDF ini.

“**Harus ada komunikasi antar kementerian dan lembaga terkait untuk mendiskusikan mengenai rencana dan tahapan yang perlu dilakukan untuk memetakan langkah-langkah apa saja yang bisa kita kerjakan ke depan.**

Nani Hendiarti

Deputy Bidang Koordinasi
Pengelolaan Lingkungan
dan Kehutanan



Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia **Momentum Kebangkitan Produk Lokal Bangsa**

Pada Kamis, 14 Mei 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau disingkat Gernas BBI. Gernas BBI ini hadir sebagai fasilitator dan akselerator transformasi digital sehingga mendorong UMKM untuk *go digital* dan memperluas jangkauan pasar UMKM hingga ke pelosok daerah.



Majalah Marves – Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) terus mengawal upaya koordinasi penguatan sektor ekonomi riil melalui pendekatan transformasi ekonomi digital pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Patut diakui, masih adanya sejumlah permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif Indonesia terjadi antara lain karena adanya perubahan perekonomian Indonesia pada tatanan makro dan mikro sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dalam tatanan mikro, perubahan pola perilaku konsumen berdampak pada penurunan daya beli dan penurunan pendapatan pada UMKM.

“Sementara, dalam tatanan makro, kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi tantangan tersendiri bagi operasi bisnis UMKM, terutama yang terbiasa beroperasi secara *offline*,” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu.

Menurut laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM, sejak 17 Maret hingga 28 April 2020, *hotline* Kemenkop UKM telah menerima pengaduan dari sebanyak 132.333 UMKM. Per Mei 2020, Kemenkop UKM mencatat bahwa dampak yang dialami oleh sektor ekonomi kreatif mencapai 20,93 persen.

Sebagian besar dari UMKM melaporkan terjadinya penurunan penjualan. Sementara itu, data dari sejumlah *platform e-commerce* justru menunjukkan terjadi peningkatan transaksi penjualan 10-15%. Tantangan-tantangan tersebut memicu lahirnya inisiatif pemerintah Indonesia dalam memperkuat ketahanan UMKM. Pada Kamis, 14 Mei 2020, Presiden Joko Widodo meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau disingkat Gernas BBI. Gernas BBI ini hadir sebagai fasilitator dan akselerator transformasi digital sehingga mendorong UMKM untuk *go digital* dan memperluas jangkauan pasar UMKM hingga ke pelosok daerah. Selain digitalisasi, objektif lainnya dari Gernas BBI adalah untuk memperkuat *nation branding* produk UMKM ekonomi kreatif Indonesia, dengan memicu tren dan keberpihakan dalam berbelanja

produk-produk lokal yang dekat secara geografis. Diharapkan terbentuknya budaya pro-produk lokal dalam masyarakat Indonesia sebagai konsumen, yang kemudian akan berpengaruh pada rantai produk-produk turunan lokal. Dengan Gernas BBI harapannya akan membuat Indonesia lebih cepat bangkit dari kondisi sekarang yang sedang dilanda pandemi Covid-19.

Kolaborasi Sebagai Kunci

Menurut data Indonesia E-Commerce Association (idEA), 80 persen UMKM mengalami peningkatan penjualan setelah melakukan digitalisasi. Hal ini karena media daring mampu memfasilitasi keterbatasan ruang dan jangkauan yang muncul sebagai dampak dari pandemi Covid-19, serta memperluas akses pasar UMKM kepada konsumen, sehingga tantangan pemenuhan permintaan dan pemasaran yang disebutkan sebelumnya dapat teratasi. Akan tetapi, digitalisasi UMKM saat ini belum terjadi secara merata. Menurut data Gernas BBI, dari total 60 juta unit UMKM berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, hanya delapan juta UMKM yang telah terhubung dengan wadah digital. Oleh karena itu, salah satu target Gernas BBI adalah meningkatkan digitalisasi UMKM dengan menambah dua juta unit UMKM digital, sehingga tercapai total 10 juta unit hingga akhir tahun 2020.

Deputi Odo menekankan peran Gernas BBI sebagai sarana penguatan UMKM lokal. Bentuk fasilitas yang diberikan oleh Gernas BBI meliputi pelatihan *e-learning* gratis, permodalan melalui program Digital Kredit UMKM (digiKU), perluasan akses pasar dalam belanja barang dan jasa pemerintah melalui LKPP dan BUMN, relaksasi sertifikasi UMKM, serta kampanye tingkat Pemerintah Pusat/Daerah/Kementerian/Lembaga.

Yang menarik, pengemasan kampanye Gernas BBI dilaksanakan dalam bentuk kampanye tematik yang masif, bertahap, dan melibatkan peran aktif berbagai kementerian



Gernas BBI lebih dari ajang promosi produk lokal, namun juga sebuah platform penguatan UMKM yang memberikan pendampingan berkelanjutan



Odo RM Manuhutu
Deputi Bidang Koordinasi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

dan lembaga lintas sektoral. Secara garis besar, Gernas BBI merupakan *macro-campaign* yang memayungi berbagai kampanye turunan yang dilaksanakan oleh setiap Kementerian dan Lembaga. Sepanjang Juni hingga Desember 2020, setiap bulannya dua kementerian dan lembaga memiliki waktu masing-masing dua minggu untuk mengencarkan kampanye turunan dengan subtema yang bervariasi dan ditandai dengan penggunaan tagar. Ini meliputi Kemenparekraf dengan tema #BeliKreatifLokal, Kemendag dengan #PernakPernikUnik, Bank Indonesia dengan #PasarSeniIndonesia, KKP dengan #PasarLautIndonesia, serta Kementan dengan tagar #PasarTani, dan masih banyak lagi. Karena keberagaman instansi tersebut, tentunya cakupan UMKM lokal yang terlibat kaya akan segmen dan industri.

Respon Positif dan Capaian yang Bombastis

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Peran Pemerintah Daerah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang digelar oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves di Yogyakarta pada hari Kamis, 15

Oktober membahas capaian terbaru Gernas BBI. “Hingga bulan September kemarin, sebanyak 2,7 juta UMKM telah masuk ke sistem digital sampai saat ini. Ini tentunya melebihi target Presiden sebanyak dua juta di akhir tahun,” ungkap Deputi Odo. Deputi Odo melanjutkan bahwa rakornas tersebut dilakukan untuk memperluas pelaksanaan Gernas BBI di tahun depan pada level nasional dengan pengoptimalan peran Pemerintah Daerah, meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke sistem digital, serta memperkuat kapasitas UMKM yang sudah *on boarding*.

Asisten Deputi Ekonomi Kreatif Deputi Parekraf Kemenko Marves Sartini Hia mengatakan bahwa angka yang telah melampaui target tersebut justru menjadi pemicu untuk Gernas BBI kembali meningkatkan capaiannya. “Gernas BBI telah melebihi dari target yang telah dicanangkan, saat ini kurang lebih sudah mencapai sekitar 2,7 juta UMKM yang *onboarding*. Meski sudah melampaui target, bukan berarti kita tidak bisa meningkatkan target ini. Kita masih memiliki waktu untuk mencapai tiga juta UMKM di hingga akhir Desember,” ujar Asdep Sartini.

Setelah di tahap pertama Pemerintah Pusat menjadi penggerak utama Gernas BBI, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan tahap kedua berupa perluasan kampanye dan penguatan kelembagaan Gernas BBI. Pada tahap kedua ini, Pemerintah Daerah akan dikoordinasikan dalam penguatan peran pada kampanye Gernas BBI. Kepala Bidang (Kabid) Inovasi Pengembangan Produk Trukan Sri Bahukeling menjelaskan bahwa pada tahap kedua ini, pemerintah daerah di seluruh provinsi Indonesia akan melakukan penguatan sosialisasi dan kampanye. “Saat ini partisipasi Gernas BBI masih tersentralisasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu digencarkan peran pemerintah daerah dalam mempromosikan Gernas BBI, agar spektrum geografis akan lebih tersebar rata.” Papar Kabid Trukan.



Selain Pemerintah Daerah, hal ini juga akan diperkuat dengan pelibatan yang lebih intensif dari pelaku usaha sektor swasta lainnya.

Langkah Penguatan Demi Keberlanjutan

Pada saat ini, upaya menjamin keberlanjutan Gernas BBI didorong dengan upaya penguatan kelembagaan dan pembuatan dasar hukum. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dihadiri oleh Menteri dan perwakilan dari lintas Kementerian/Lembaga dan ekosistem digital mengusulkan dibentuknya Tim Nasional Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, sebagai keberlanjutan Gernas BBI di

tahun 2021 mendatang. Menindaklanjuti usulan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melaksanakan proses pengusulan dan penetapan draft Keputusan Presiden Tim Nasional Gernas BBI. Harapannya, terbentuknya Timnas Gernas BBI akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan kampanye, penganggaran dan penyaluran stimulus ekonomi yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pelaku usaha. "Capaian yang melebihi target kemarin terjadi karena kontribusi dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kunci dari keberlanjutan Gernas BBI ke depannya adalah gotong royong dalam sinergi penguatan perekonomian Indonesia," pungkas Deputy Odo.



Potensi Logam Tanah Jarang Mempercepat Industri Nasional

Seperti namanya, masih banyak yang belum mendengar atau mengetahui tentang Logam Tanah Jarang (*rare earth element*). Logam Tanah Jarang atau biasa disingkat LTJ terdiri dari 17 kumpulan unsur-unsur kimia pada tabel periodik yang terdiri dari 15 unsur *lantanida* ditambah dengan *scandium* dan *yttrium*.



Majalah Marves – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi turut melakukan pengawalan eksplorasi Logam Tanah Jarang, yang dipantau langsung di bawah Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Seperti namanya, masih banyak yang belum mendengar atau mengetahui tentang Logam Tanah Jarang (*rare earth element*). Logam Tanah Jarang atau biasa disingkat LTJ terdiri dari 17 kumpulan unsur-unsur kimia pada tabel periodik yang terdiri dari 15 unsur lantanida ditambah dengan scandium dan yttrium. Penamaan ‘Tanah Jarang’ disebabkan karena keberadaan LTJ yang tidak banyak dan sulit dijumpai.

LTJ merupakan salah satu jenis mineral strategis yang termasuk sebagai “*critical mineral*” yang saat ini banyak dicari oleh berbagai negara di dunia, khususnya di Eropa. Unsur-unsur yang terdapat dalam LTJ sangat berperan penting dalam pengembangan industri nasional berbasis teknologi dan karenanya, saat ini LTJ menjadi salah satu komoditas strategis di dunia dan dicari oleh berbagai negara. Hasil olahan LTJ memiliki beragam kegunaan yang dapat membantu percepatan industri nasional. LTJ dapat digunakan sebagai bahan pembuat superkonduktor, laser, optik elektronik, *glass*, dan keramik. Mineral ini juga dibutuhkan dalam pembuatan berbagai peralatan vital militer, serta berbagai produk berteknologi tinggi seperti kendaraan bermobil listrik, televisi, telepon seluler, serta perangkat pemandu rudal nuklir.

Pada rapat koordinasi Senin (06-07-2020) yang dilakukan Kemenko Marves dengan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, dipaparkan bahwa potensi LTJ di Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam *mineral monazite* yang merupakan mineral ikutan dari hasil olahan Timah. Selain itu, potensi LTJ juga dapat ditemukan sebagai produk turunan dari hasil pengolahan Nikel Laterit dan juga dari lumpur merah (*red mud*) yang merupakan hasil sisa pengolahan Bauksit.

Proses eksplorasi LTJ yang paling memungkinkan dilakukan saat ini ialah eksplorasi *scandium* yang didapat dari memproses lumpur merah. Nantinya,

lumpur merah akan diolah menjadi LTJ *scandium* yang memiliki nilai strategis bagi industri pertahanan dan juga industri kesehatan. Langkah selanjutnya ialah memastikan jumlah perhitungan cadangan scandium yang dimiliki melalui Mind ID selaku *holding* industri pertambangan BUMN. Sementara itu, berdasarkan laporan dari PT Timah, saat ini Indonesia telah mencatat cadangan monazite sebanyak 1.450 ton.

LTJ juga memiliki nilai jual yang tinggi. *Scandium Oxide* yang merupakan produk turunan dari scandium memiliki nilai sekitar USD 3.000 – 4.000 per kg sedangkan *Neodymium Oxide* dan *Praseodymium Oxide* yang merupakan produk turunan dari *Monazite* memiliki nilai sekitar USD 3.000 – 4.000 per ton. Di Indonesia, eksplorasi LTJ dilakukan di berbagai daerah seperti di Parmonangan (Sumatera Utara), Bangka Belitung, Ketapang (Kalimantan Barat), Banggai (Sulawesi Tengah), serta Papua Barat.

“Mengingat LTJ merupakan mineral sangat strategis, untuk mendukung industri nasional sekarang dan masa depan, penting untuk kita dapat menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber daya dan cadangannya melalui kegiatan eksplorasi serta terus mengembangkan kemampuan teknologi untuk dapat mengekstraksi dan memanfaatkan LTJ tersebut,” ujar Asisten Deputi Pertambangan Tubagus Nugraha.

Di masa mendatang kajian dan eksplorasi terhadap Logam Tanah Jarang akan terus dilakukan. Diharapkan, potensi LTJ yang ada dapat dipergunakan semaksimal mungkin sehingga akan membantu percepatan pada industri nasional.

Pemerintah Dukung Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



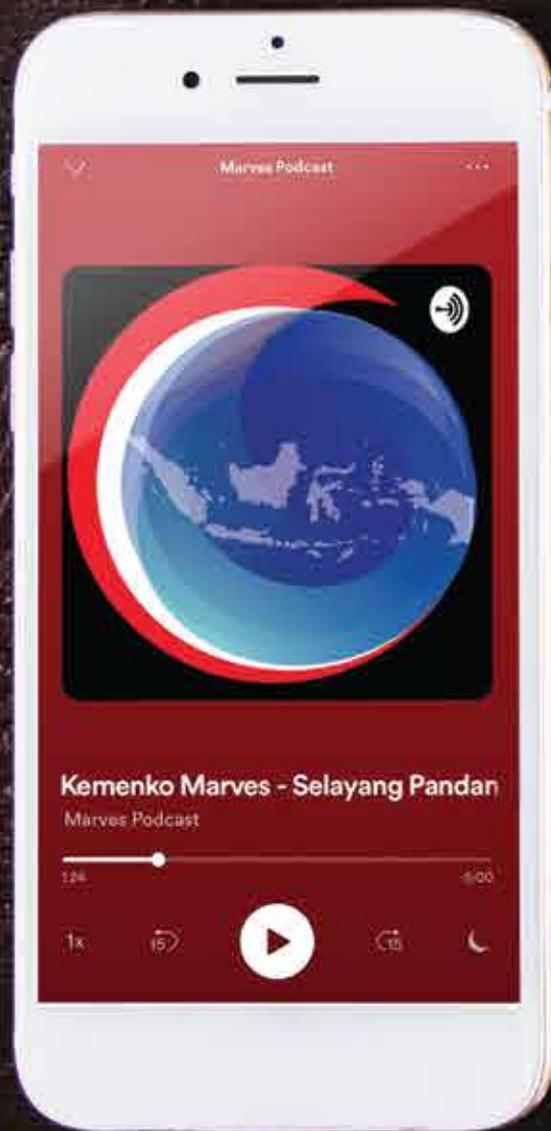
Majalah Marves – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Kementerian Pariwisata/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersinergi untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Seperti disebutkan dalam Perpres nomor 28/2020, kedua kementerian yang merupakan anggota Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini saling berkoordinasi sesuai tugas dan fungsinya untuk mengembangkan dan menjalankan ekonomi dan keuangan syariah melalui perumusan arah kebijakan dan penyusunan program strategis nasional. Agar implementasi Perpres tersebut dapat berjalan lancar, Kemenparekraf/Baparekraf menginisiasi sebuah Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di Jakarta, Rabu 2 September 2020.

Menurut Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Marves Sugeng Santoso yang mewakili Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, kegiatan tersebut bertujuan agar menghasilkan kajian yang dapat menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaannya. “Sejauh ini sesuai dengan *master plan* ekonomi dan keuangan syariah 2019-2024 penguatan rantai nilai pariwisata ramah muslim, penguatan rantai makanan-minuman halal, penguatan rantai nilai fesyen muslim, penguatan rantai nilai media rekreasi halal merupakan ranah Kemenparekraf/Baparekraf, sehingga bagaimana konsepnya dan bagaimana aktivitas yang dilakukan, disinilah (DKT, red) *digodognya*,” jelasnya saat memberikan sambutan di hadapan narasumber dan peserta DKT yang berasal dari KNEKS, Kemenkeu, BI, OJK, Kemenkop dan UKM, Kemenag serta Kemenparekraf/Baparekraf.

Menurutnya, penguatan rantai nilai industri halal ini terkait dengan aktivitas yang dilakukan untuk mempermudah pelaku Ekraf & UMKM dalam mengakses permodalan dan sertifikasi halal, literasi dan pemanfaatan keuangan syariah dan ekonomi digital.

Lebih jauh, SAM Sugeng menjelaskan bahwa koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Ekonomi dan keuangan syariah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara Kemenparekraf/ Baparekraf dan beberapa pihak terkait pada tahap awal dilaksanakan untuk menghasilkan kajian akademis pada tahun 2020. “Hasil dari DKT akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan/ *‘pilot project’* pada beberapa daerah dan penyusunan petunjuk teknis pada tahun berikutnya,” tambahnya.

Kemudian, lanjut SAM Sugeng, Kemenko Marves sebagai anggota dari KNEKS telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Direktur Eksekutif KNEKS bahwa guna memudahkan koordinasi mengenai Ekonomi dan Keuangan Syariah, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim menjadi perwakilan Kemenko Marves dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. “Terpenting, saya berharap agar sistem ekonomi dan keuangan syariah mampu menopang lini perekonomian baik selama masa pandemi maupun ketika masyarakat sudah mulai beradaptasi kebiasaan baru/*new normal*, sinergi dan kolaborasi antar berbagai pihak terutama dengan berubahnya tren pariwisata dan ekonomi kreatif,” jelasnya.



Podcast Media Kemenko Marves

Media kementerian dengan berbagai macam informasi *update* bersama narasumber pilihan Kemenko Marves

SAM Rameyo : Peran MHA Mutlak Diperlukan Dalam Perencanaan Pembangunan

Majalah Marves - Kearifan lokal atau *traditional knowledge* yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) sejak lama, dinilai dapat menjadi salah satu kunci jawaban bagi pembangunan nasional. Anggapan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa *traditional knowledge* “belum” sesuai dengan kaidah pembangunan modern, dipandang tidak tepat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Bidang Sosio-Antropologi (SAM) Tukul Rameyo, saat menjadi salah seorang narasumber dalam forum diskusi virtual Denpasar 12, bertema “Urgensi UU MHA Dalam Bingkai NKRI, pada Kamis 27 Agustus 2020. “Ini perlu diangkat untuk menjadi urgensi, demi perbaikan ke depan bagi MHA. *Traditional knowledge* bisa jadi lebih advan, kearifan dan pengetahuan tradisi ini masih dianggap tidak sesuai dengan norma dan kaidah pembangunan modern, padahal bila kita perdalam bisa jadi ini adalah salah satu jawaban,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam RPJMN 2020-2024, salah satu program prioritas adalah meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. “Apabila bisa ditetapkan, antara lain bagi masyarakat adat pesisir, ini ternyata menyangkut dari hulu ke hilir dan mengandung berbagai konsep, di antaranya teknologi yang lebih adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dalam RPJMN 2020-2024, masyarakat adat dituntut berperan serta dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat adat dalam SDG’S bila

merujuk pada tujuan SDG’S haruslah berbasis pada kearifan dan pengetahuan tradisi,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, dipaparkan pula salah satu permasalahan yang kerap terjadi pada MHA. Salah satu masalahnya adalah, masih sering terjadi friksi yang menyangkut tanah ulayat milik MHA. Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara, RA Yani Kuswawidjojo mengatakan, permasalahan yang sering terjadi memang mengenai permasalahan tanah ulayat. “Saya berkeliling ke seluruh Keraton, hampir seluruh masalah adalah masalah hak atas tanah MHA, di sini negara harus hadir, para raja masih banyak didengar oleh masyarakat, masyarakat masih banyak yang meminta perlindungan ke Keraton, kami mencoba untuk terus menjaga semampu kami, karena secara resmi kita hanya berdaulat secara budaya, komunitas masyarakat adat adalah benteng utama persatuan dan kesatuan,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum MPR RI Lestari Moerdijat, pun menambahkan, MHA adalah unsur penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak dapat dipisahkan dari 4 pilar kebangsaan. “Masyarakat adalah pertahanan, nyawa dan jiwa Indonesia. masyarakat adat turut berperan besar mencapai kemerdekaan RI, tidak bisa dipisahkan dari 4 pilar kebangsaan. Permasalahan tanah ulayat, sebelum terlambat ayo kita bergerak bersama-sama dan duduk bersama untuk mencari solusi yang lebih baik,” pungkasnya.



**AYO
PAKAI
MASKER**



Dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, tes dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu sistem seleksi akan dilakukan secara transparan.





Seleksi CPNS Kemenko Marves

Majalah Marves - Pemerintah akan melanjutkan kembali tahapan seleksi calon pegawai negeri (CPNS) yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Seleksi CPNS ini akan dilaksanakan secara Nasional pada September 2020 hingga awal Oktober 2020. Sinyal positif ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo melalui surat edaran yang meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan lanjutan tahapan seleksi.

Terkait hal ini, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Arif Rahman menyatakan dukungannya. "Kita perlu apresiasi upaya Kemenpan RB dalam penyelenggaraan tes seleksi CAT SKB ini," ujarnya.

Dengan situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dia menjelaskan bahwa tes akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu sistem seleksi akan dilakukan secara transparan. "Seleksi berlaku obyektif, semua pihak dapat memonitor secara *online* sehingga dapat terhindar dari KKN, tegas Kabiro Arif. Dengan format seperti itu,

menurutnya akan mampu memunculkan nama-nama kandidat terbaik yang bisa diusulkan untuk diterima sebagai CPNS di Kemenko Marves.

Lebih detail, ada beragam rangkaian tahapan yang harus dijalani dalam proses seleksi CPNS. Pertama, peserta perlu melakukan tahapan pendaftaran dan registrasi secara *online*. Setelah melalui tahapan tersebut, akan dilakukan seleksi administrasi berdasarkan berkas yang sudah dikumpulkan pada saat pendaftaran *online*. Selanjutnya tahapan yang harus dilalui ialah seleksi Kemampuan Dasar sesuai dengan sistem seleksi nasional. Setelah itu, peserta seleksi CPNS akan mengikuti pelaksanaan Seleksi Kemampuan Bidang atau SKB. Lokasi pelaksanaan SKB ini bertempat di kantor BKN daerah yang dipilih oleh para peserta seleksi dan diharapkan merupakan lokasi yang lebih dekat dengan domisili para calon CPNS.

Sementara itu untuk seleksi SKB CPNS Kemenko Marves telah dilaksanakan di beberapa kota, yaitu : Banda Aceh, Medan, Serang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar.



Resensi Film: Guru-Guru Gokil



Majalah Marves - "Buah jatuh tak jauh dari pohonnya" itulah kira-kira yang dialami Taat Pribadi (Gading Marten) dalam film bertajuk 'Guru-Guru Gokil'. Bercita-cita menjadi kaya raya dengan mencoba keberuntungannya di kota besar ternyata bukan hal yang mudah untuk Taat. Keuangan semakin menipis dan kesuksesan tak kunjung tiba, Taat akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan bekerja sebagai guru pengganti di SMA Gunung Asri, SMA yang sama dengan tempat sang Ayah mengajar. Padahal bagi Taat, menjadi guru adalah pekerjaan yang paling ia hindari.

Menjadi guru pengganti sesungguhnya adalah pilihan terakhir Taat, setelah sebelumnya ia terlebih dahulu berkunjung ke agen pencari kerja dan tertarik bekerja di kapal pesiar. Sayangnya, Taat harus terlebih dahulu mengumpulkan uang dalam jumlah banyak untuk bisa diterima kerja di kapal pesiar tersebut. Tidak ada biaya, si agen pencari kerja kemudian menyarankan Taat untuk mengambil pekerjaan lain yakni sebagai guru pengganti di SMA Gunung Asri.

Baru saja menyandang titel sebagai guru sejarah, Taat dihadapkan dengan perampokan gaji para guru dan uang sang Ayah yang memasuki masa pensiun (uang pensiun). Taat pun tidak tinggal diam, dia berjanji kepada para guru akan menginvestigasi siapa sosok perampok dan mendapatkan kembali uang tersebut. Dalam pencariannya ini, Taat bekerja sama dengan beberapa guru lainnya yakni Ibu Rahayu (Faradina Mufti) guru yang terkenal jutek namun akhirnya luluh di tangan Taat, Ibu Nirmala (Dian Sastrowardoyo) guru yang sedang hamil besar dengan 'kelemotannya', dan Bapak Manul (Boris Bokir) guru batak dengan kepolosan dan kelucuannya.

Berbagai peristiwa mulai dari komedi hingga serius pun mewarnai aksi pencarian para perampok tersebut, mulai dari bagaimana cara mereka mengelabui para perampok, terungkapnya dalang di balik perampokan, hingga hal yang tidak diduga, yakni dihadapkan dengan Taat yang ingin mengambil sebagian uang pensiun ayahnya secara diam-diam untuk melamar kerja di kapal pesiar. Berhasilkah?

Selain disuguhkan aksi para guru, film besutan sutradara Sammaria Simanjuntak ini juga memperlihatkan bagaimana para murid sekolah yang bukan hanya 'dicap' nakal saja, tetapi juga sangat peduli kepada guru mereka. Bukan hanya itu, kisah cinta juga menghiasi film yang tayang sejak pertengahan bulan Agustus ini, di mana Taat berhasil meluluhkan hati Ibu Rahayu.

Secara keseluruhan, film 'Guru-Guru Gokil' sangat seru untuk dinikmati bersama seluruh anggota keluarga. Setiap adegan dan dialognya 'aman' untuk ditonton semua usia, bahkan beberapa bagian membuat kita senyum-senyum sendiri karena mengingat masa-masa di sekolah. Jadi, jangan lupa ditonton ya!





Cerita Pendek

Lelaki Dalam Lukisan

Karya Joko Rehutomo

Kusapukan warna kelabu pada rambutnya yang ikal. Hitam pada manik mata dan coklat matang pada kulit. Sama seperti lukisan lain, degradasi warna selalu menjadi fokus, di samping guratan khas yang menjadi ciri setiap karyaku. Sempurna! Kini wajah lelaki itu semakin memancarkan karisma.

“Kamu melukis sosokku harus lebih dari aslinya!” Perintah lelaki itu sebulan lalu, sok kuasa. Entah dari siapa ia mengetahui alamat galeriku yang terpencil ini. Kehadirannya hanya ditemani sopir. Kurasa ia merangkap sebagai pengawal pribadi, nampak dari fisiknya yang tegap, dengan sorot mata setajam burung hantu.

“Maksud Tuan, bagaimana?”

“Pokoknya penampilanku harus mencerminkan kemegahan!” Kata-katanya semakin ngawur. Mengingatkan pada gaya bahasa mantan tunangan penyanyi dangdut bergoyang unggas, yang sempat heboh beberapa waktu lampau.

“Maaf, maksudnya Anda kelihatan lebih tampan dan gagah begitu?” selidikku, sembari menengok perawakannya lebih teliti. Cukup jangkung untuk ukuran orang Indonesia, dengan tubuh tambun bulat. Perutnya nampak membukit di balik jas hitam licin. Wajahnya begitu familiar beberapa bulan belakangan, tersebut ia sering diundang dalam sebuah acara perbincangan sebuah stasiun televisi.

“Ya, setidaknya tidak kalah dengan para artis sinetron yang ramai-ramai bersaing denganku nanti,”

“Oh, buat mempromosikan diri, ya?” tanyaku meledek. “Bukankah Tuan sudah lama berkecimpung di dunia politik? Tentunya jago dong menarik simpati publik.”

“Itu, pasti! Tapi ini soal lain. Kuinginkan pencitraan yang berbeda di musim kampanye nanti!” sahutnya berapi-api. Dalam hati aku yakin, rasa rendah diri mulai menggerogoti.

Sebagai politikus senior tak diragukan lagi kepiawaiannya berakrobat lidah. Bahkan untuk musim mendatang, merupakan pencalonan ketiga untuk menjadi seorang caleg.

"Lalu, kenapa Tuan memilikiku untuk melukis sosok Anda?"

"Jangan bercanda, Bung. Tentunya kamu sudah tahu kenapa aku memilihmu," jawabnya diplomatis.

"Sungguh, aku tak tahu. Bukankah masih banyak pelukis lain yang lebih mumpuni?"

Ia tak gegas menjawab. Berputar-putar, langkahnya terhenti di depan lukisan perempuan penari Bali yang belum tuntas.

"Sudah lama aku menjadi pengagum lukisan, Bung. Beberapa media cetak memberitakan Bung-lah pelukis realis terbaik sekarang ini. Bahkan aku punya koleksi beberapa lukisan."

"Terima kasih, sungguh aku merasa tersanjung. Bukankah kita baru bertemu sekarang?"

Lalu kapan kita bertransaksi?" berondongku penasaran.

"Hahaha...", tawanya menggelegak, hingga perutnya bergoyang. "Ingatkah dengan lelaki perlente yang membeli tiga lukisan paling mahal, pada pameran tunggal Bung tiga bulan lalu?" Wah, lelaki ini memang benar-benar menyebabkan. Otakku harus memutar ulang ingatanku yang semakin hari bertambah payah seiring melajunya usia.

"Itu orang suruhan, Tuan?" sahutku jengah.

"Tepat sekali. Dan aku benar-benar puas dengan karya, Bung. Benar-benar lebih indah dari objek aslinya!"

"Langsung saja, silahkan Tuan berpose. Akan kulukis sekarang!" Akhirnya aku tak sabar dengan segala basa-basinya.

Sebenarnya ingin kutolak, tapi harga yang ditawarkan benar-benar menggairahkan.

Beberapa teman sesama pelukis, pasti akan mencibir, karena aku terlalu mengejar materi dan menggadaikan "nurani" dalam berkesenian. Siapa peduli dengan semua omong kosong itu? Bukankah setiap manusia hidup butuh uang? Toh, aku tak mencuri atau berbuat tercela lainnya.

Apalagi aku mempunyai impian besar, membangun galeri yang lebih luas dan representatif untuk memajang semua karyaku. Bukan seperti sekarang, sebagian besar

tertumpuk di gudang sempit berdebu. Kesempatan itu kini terbuka lebar. Apakah harus kutolak?

Betapa pandirnya diriku!

"Oke, di mana harus berpose?" tanyanya menantang.

Spontan kutunjuk sudut galeri, tempat biasanya para model lukisan bergaya.

"Di situ?!" suaranya meninggi. Bibirnya mencibir seperti paruh bebek. Jujur, aku meradang. Mungkin kalau bukan "Tuan yang terhormat" itu, sudah kuusir dengan kasar.

"Memang kenapa, Tuan?"

"Aku nggak suka. Sudut itu terlalu sederhana, kurang elegan! Tak pantas buat latar lukisan!" ejeknya congkak.

"Lalu, mau Tuan di mana?" buruku memendam kesal. Dalam hati aku menyumpah panjang-pendek!

"Begini saja. Aku punya beberapa foto dengan pose dan latar yang bagus di rumah.

Secepatnya pengawalku akan mengantarkan kemari!"

Sebelum diriku membuka mulut menimpali, handphonenya berderik. Jari telunjuk mengarah ke tengah bibir, pertanda kuharus diam. Tak lama berselang ia bercakap dengan seseorang. Sungguh, aku tak peduli ia mau berbicara apa. Tapi dari suaranya yang kencang, tertangkap jelas apa yang menjadi topiknyanya. Apalagi kalau bukan masalah pencalonannya menjadi anggota dewan!

"Sory, aku harus pergi. Ada rapat mendadak dengan tim suksesku!" Tanpa peduli ia gegas melangkah, diikuti pengawal yang setia itu.

Tuan yang terhormat itu menepati janji. Ia mengirim sepuluh lembar foto dirinya dengan berbagai pose. Ada yang sedang duduk di ruang kerja, berdiri di depan gedung wakil rakyat, main golf, serta pose kegiatan pribadi lainnya.

"Mana yang harus kulukis?"

"Semuanya!" jawab pengawal pribadi itu kaku.

"Hah, semuanya? Sepuluh foto ini?"

"Ya!"

Aku serasa host sebuah acara kuis di TV yang sedang on air. Menanyai setiap peserta yang harus dijawab dengan dua kata, "ya" atau "tidak". Tak lebih!

"Lalu berapa waktu yang diberikan untuk menyelesaikan semuanya?"

"Seminggu untuk satu lukisan!"

"Jadi semua harus diselesaikan dalam tempo 2,5 bulan? Gila! Biasanya satu lukisan aku rampungkan

minimal dalam satu bulan. Ini benar-benar kerja rodi!” dengusku tak percaya.

“Ya, ini perintah dari Tuan. Sebab tiga bulan lagi beliau akan mendeklarasikan diri sebagai caleg sekaligus ketua partai. Selanjutnya setiap lukisan yang jadi langsung ditransfer pembayarannya. Ada barang ada uang!”

“Terus apa hubungannya dengan lukisanku?”

“Di dinding ruangan penyelenggaraan acara nanti akan dipenuhi dengan lukisan Tuan. Jadi setiap mata yang hadir akan kagum dengan sosok Tuan yang lebih berwibawa, elegan dan artistik!” terangnya sambil menyodorkan map yang sedari tadi dipegang.

“Apa ini?”

“Surat perjanjian kerja!” Busyet! Aku kira baru kali ini seorang pelukis sepertiku harus menandatangani perjanjian kerja untuk hasil karyanya. Salah satu butir perjanjian menyatakan lukisan harus rampung tepat waktu, dan bayaranku akan berkurang bila terlambat.

Beberapa saat aku tercenung. Kebimbangan meruah! Tapi galeri yang megah tak akan terwujud bila kubatalkan. Apakah impian menjadi pelukis paling tersohor di negeri ini harus pupus begitu saja? Rontok karena idealisme semu? “Baiklah, sepakat!” Akhirnya kalimat pendek itu terlontar begitu saja dari bibir. Tanpa ekspresi, si pengawal menjabat tangan dengan kuat. Sudut bibirnya bergerak, tersenyum sinis.

Kembali mataku tertuju pada lukisan yang sudah paripurna itu. Lukisan keempat dari si Tuan yang terhormat, pose berdiri gagah sembari kedua jari membentuk huruf “V”. Victory berarti kemenangan dan kejayaan. Nampaknya ia begitu yakin akan peluangnya kali ini!

Kurasa tak ada lagi yang perlu ditambahkan. Tinggal membubuhkan tanda tangan di pojok kanan bawah, sebagai penanda lukisan itu asli guratan tanganku.

Kufoto lukisan itu dan semenit kemudian telah terkirim kepadanya melalui MMS. Biasanya lelaki itu akan segera membalas dengan beberapa masukan bila dirasa lukisan dirinya kurang sempurna. Harus kuakui, ia memiliki selera seni yang lumayan!

Setengah jam berselang, tak ada balasan. Kupikir ia sedang sibuk rapat dengan stafnya. Satu jam lewat handphone tetap membisu. Suntuk, kupencet tombol remote control. Kugontaganti chanel stasiun TV dengan gelisah. Tiada yang menarik, hanya seputar sinetron penjual mimpi dan acara debat yang tak berujung pangkal. Berseling iklan menawarkan beragam produk yang membuat masyarakat semakin konsumtif. Running teks berseliweran di bawah layar, dari kanan ke kiri. Mata lelahku mengerjap, menajamkan pandangan. Astaga, apa benar yang kubaca?

Tertera berita tentang si Tuan yang terhormat tengah mengalami serangan jantung. Ia mendadak roboh ketika sedang mempertahankan pendapat waktu mengikuti sidang paripurna.

Reflek kupindah saluran lain. Breaking news! Seorang reporter perempuan tengah mewawancarai sekretaris serta teman-teman para anggota dewan. Ditayangkan pula kepanikan ketika lelaki itu dimasukkan ke dalam ambulans. Terjadi keributan ketika para awak media yang ngotot meliput bersitegang dengan para pengawal pribadi dan satpam. Handphone bergetar. Terburu kuangkat tanpa memerhatikan nama di layar. Terdengar suara kaku yang begitu karib. Mendadak badanku lemas. Si pengawal memberitahukan, keadaan Tuan yang terhormat sedang kritis. Para dokter tak bisa memastikan kapan si Tuan akan pulih. Dan untuk sementara, proyek lukisan ditunda dalam jangka waktu tak terbatas! Mendadak seribu kunang-kunang berkejeran di pelupuk mata. Bayangan galeri megah kini berubah menjadi halimun. Samar dan menggelap! (*)

Tahukah Kamu?



Destinasi Pariwisata Super Prioritas Likupang

Salam #TimMarves!

Yuk, kita telusuri lebih jauh tentang Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang!

Likupang yang diresmikan sebagai bagian dari DPSP pada Juli 2019 oleh Presiden Joko Widodo ini terletak di provinsi Sulawesi Utara. DPSP Likupang meliputi Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado.

Likupang adalah daerah pesisir dengan pantai berpasir putih, dan luas kurang lebih 200 ha. Selain berstatus DPSP, Likupang juga merupakan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK, lho!

Ada berbagai potensi pariwisata yang beragam di DPSP Likupang, mulai dari Pantai Pulisan, Pantai Pal, Pantai Mangatasik, Danau Linow, Benteng Moraya, Bukit Kasih, Bukit Ka'i Santi, hingga Galeri Pinawetengan. Likupang juga dikenal akan beragam kuliner khas hasil olahan laut yang segar dan lezat seperti ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan roa.



Logam Tanah Jarang

Salam #TimMarves,

Buat yang suka nonton drama Korea, pasti tahu cerita tentang sebuah kerajaan di dunia paralel yang jadi kaya raya karena punya potensi Logam Tanah Jarang. Nah, tahukah kalian bahwa ternyata Logam Tanah Jarang itu beneran ada, loh, bukan hanya fiksi belaka! Bahkan, Logam Tanah Jarang (LTJ) pun bisa ditemukan juga di Indonesia.

Seperti namanya, keberadaan Logam Tanah Jarang cukup sulit dijumpai dan tidak begitu banyak. LTJ ini sebenarnya merupakan jenis logam yang terdiri dari 17 unsur-unsur kimia pada tabel periodik, yang terdiri dari 15 unsur lantanida, ditambah dengan scandium dan yttrium.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan riset pemetaan jumlah cadangan serta upaya eksplorasi LTJ. Sejauh ini, Indonesia memiliki potensi LTJ berupa unsur scandium serta monazite yang terkandung dalam endapan bijih nikel laterit dan *red mud*, serta timah.

LTJ termasuk ke dalam mineral strategis yang memiliki banyak fungsi. Produk olahan LTJ bisa dimanfaatkan untuk industri persenjataan, kendaraan bermobil listrik, bahan pembuat pesawat, dan berbagai produk teknologi lainnya. Dengan demikian, pemanfaatan LTJ dapat berkontribusi bagi percepatan industrialisasi nasional.

SEJARAH HARI MARITIM

Tahun 1953

Pidato Presiden Soekarno saat meresmikan Institut Angkatan Laut.



Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongsong-jongsong di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.

-Ir. Soekarno



Tahun 1957

Deklarasi Djuanda

Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.



Tahun 1964

Melalui Musyawarah Nasional (Munas) Maritim I, Presiden Soekarno mengeluarkan SK Nomor.249/1964 yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional.



Deklarasi Djuanda

- Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
- Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
- Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan:
 - a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat
 - b. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan
 - c. Untuk mengatur lalu lintas dan alat pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI



Indonesia Dapat dilihat dari 3 Aspek

1 Kepulauan
Berupa kumpulan pulau, Indonesia dilihat terkait aspek geografis dan wilayah



2 Kelautan
Indonesia dilihat terkait sumber daya di dalam laut



3 Kemaritiman/Bahari

Indonesia dilihat terkait aktivitas dalam laut seperti perdagangan, pelabuhan, olahraga, pariwisata, perhubungan, dan lain-lain.





Kementerian Koordinator
Bidang Kematriman dan Investasi

Selamat Hari Maritim Nasional 23 September 2020



www.maritim.go.id



Kemenko Bidang
Kematriman dan Investasi RI



@kemenkomarves



@kemenkomarves



Kemenko Bidang
Kematriman dan Investasi